

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum ke-59 Amerika Serikat pada 3 November 2020 telah memenangkan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Joe Biden bersama pasangannya Kamala Harris dari Partai Demokrat memang telah memenangi pemilihan presiden AS mengalahkan petahana dari Partai Republik Donald Trump-Mike Pence setelah meraih sebanyak 290 *electoral votes*. Biden meraih 290 *electoral votes*, sementara dari partai Republik Donald Trump hanya 214 suara elektoral. Jumlah itu melampaui ambang batas 270 *electoral votes* dari total 538 *electoral votes* untuk dapat memenangkan Pilpres AS, sehingga dipastikan Biden menang dalam Pilpres AS (Saleh, 2020).

Kemenangan Joe Biden dalam pemilu Amerika Serikat juga tidak lepas dari kekurangan Donald Trump dalam memimpin selama empat tahun menjadi presiden. Beberapa hal yang menjadi kekurangan Presiden Donald Trump diantaranya adalah dalam hubungannya dengan China, pemerintahan Trump berusaha membentuk pandangan AS yang semakin bermusuhan dengan China sebagai negara ancaman karena memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia (Miranti, 2021). Kemudian pemerintahan Trump juga menerapkan tarif yang besar atas barang-barang impor China, selain itu pemerintahan Trump memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan top China seperti Huawei, ZTE, SMIC, dan TikTok. Kebijakan lain dari

Presiden Donald Trump yang dirasakan sebagai kekurangan adalah hutang nasional AS yang melonjak hampir US \$ 7,8 triliun menjadi US \$ 27 triliun, karena pendapatan pajak perusahaan turun dan pengeluaran meningkat untuk melawan dampak perang dagang dan pandemic *COVID-19*. Dalam hal perubahan iklim, Trump secara rutin menolak konsensus ilmiah bahwa industri menyebabkan pemanasan global serta melakukan pencabutan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Dan kemudian tentang ke imigrasian, Trump memberlakukan larangan perjalanan di beberapa negara mayoritas muslim, memangkas program pengungsi AS dan memaksa puluhan ribu pencari suaka menunggu di Meksiko untuk sidang pengadilan AS. Kebijakan ini menyebabkan beberapa ribu anak dipisahkan dari orang tua di perbatasan AS-Meksiko.

Selanjutnya, kemenangan Joe Biden tentunya juga tidak lepas dari berbagai janji-janji yang dia sampaikan disaat kampanye pilihan presiden Amerika Serikat. Beberapa janji kampanye dari Joe Biden antara lain yaitu pertama, mengubah kebijakan kepemilikan senjata. Dalam kampanye Joe Biden berjanji menerapkan kebijakan yang melarang kepemilikan senjata api berstandar militer oleh publik, mencegah kemungkinan seseorang membeli senjata api lebih dari satu, hal ini telah diperkuat dengan larangan penjualan senjata api dan perlengkapannya secara online, serta membuat kebijakan seleksi kepemilikan senjata api yang ketat dan mempertimbangkan berbagai faktor latar belakang pembelinya. Kedua, berjanji melanjutkan program jaminan kesehatan yang terjangkau kepada masyarakat. Antaralain adalah Joe Biden ingin membangun dan memperluas *Affordable Care Act* (ACA)

atau kerap disebut *Obama Care* yang sebelumnya telah digagas oleh mantan Presiden Barack Obama. Lebih lanjut Joe Biden juga ingin memperluas kriteria warga yang layak mengikuti *Medicare* dan *Medicaid*, warga yang berusia 60 tahun boleh menjadi peserta *Medicare* yang mana sebelumnya adalah yang berusia lebih dari 65 tahun. Ketiga, berjanji memberikan hak kepada perempuan untuk melakukan aborsi. Kebijakan ini dikenal dengan nama *pro choice* dan didukung oleh kalangan liberal. Di masa Donald Trump, aborsi menjadi topik kontroversial karena ia menolaknya. Keempat, berjanji menganggarkan investasi US\$ 1,7 Triliun (Rp 24 Ribu Triliun) disektor energi terbarukan dan penanganan perubahan iklim. Hal ini akan didukung dengan serangkaian perintah eksekutif soal perubahan iklim. Kelima, berjanji membebaskan biaya vaksinasi *COVID-19* kepada warga Amerika. Selain itu, Biden juga telah memperpanjang tunjangan bagi pengangguran untuk membantu mereka yang belum dapat mencari nafkah akibat *COVID-19*. Keenam, berjanji membuat kebijakan yang pro industri manufaktur dan inovasi. Hal itu untuk memastikan Amerika yang lebih berswasembada dan tidak bergantung pada produk impor. Hal ini akan parallel dengan kebijakan dengan energi bersih. Ketujuh, berjanji untuk mengubah kebijakan *Tax Cuts & Jobs Act* bentukan Donald Trump yang memangkas PPh badan perusahaan. Joe Biden ingin kebijakan pajak yang lebih adil. Orang kaya dan konglomerat harus membayar pajak lebih besar. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan di bawah US\$400 ribu per tahun mendapat keringanan pajak

(Ramadhan, 2020)

Terbukti dengan beberapa hal yang dijanjikan dalam kampanye, telah mampu mengantarkan Joe Biden sebagai kepala presiden terpilih tahun 2020 sampai dengan selesai jabatannya. Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat tampaknya menimbulkan perubahan arah kebijakan politik Amerika Serikat, khususnya terhadap negara-negara Timur Tengah. Beberapa kebijakannya antara lain adalah Joe Biden bergabung kembali dengan beberapa perjanjian internasional yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh Presiden Trump, diantaranya adalah kesepakatan memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan dari menurunnya program nuklir, bergabung kembali dengan perjanjian nuklir setelah Iran kembali menghormati peraturan dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Lebih lanjut, Biden juga mengakhiri dukungan AS atas perang yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Tingginya angka kematian warga sipil di Yaman telah membangun penentangan kuat terhadap keterlibatan AS dari partai sayap kiri. Biden tidak mengadopsi kebijakan pemerintahan Trump terhadap Tepi Barat Palestina yang diduduki oleh Israel. Biden juga tidak mendukung deklarasi bahwa permukiman Israel tidak melanggar hukum internasional, dan tidak menolerir rencana Israel untuk mengambil alih sebagian wilayah Palestina secara sepihak (Usher, 2020). Khusus dalam konflik Timur Tengah, Biden menyatakan juga tidak mengadopsi kebijakan pemerintahan Trump (Kurniadi, 2020). Banyak harapan bahwa Biden dapat meneruskan pendekatan yang pernah dilakukan Obama yang relatif mampu meredakan konflik di Timur Tengah. Pendekatan arah kebijakan luar negeri Amerika di era Joe Biden dipandang lebih mengedepankan pendekatan multilateralisme dan dianggap

membuka peluang kerjasama di Timur Tengah baik itu bidang ekonomi dan di bidang keamanan. (Ariesta, 2021)

Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden baru Joe Biden ingin mengembalikan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dengan tidak mempertahankan beberapa kebijakan yang dibuat oleh presiden sebelumnya yaitu Presiden Donald Trump yang menimbulkan banyak ketegangan yaitu dengan cara memperbaiki kembali hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu Bagaimana kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah sejak Joe Biden terpilih sebagai presiden AS ?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti dan mengupas lebih jauh tentang kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh presiden Joe Biden untuk Timur Tengah sejak terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

D. Kerangka Pemikiran

Melihat latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penulis akan menggunakan teori kebijakan politik luar negeri dan konsep Multilateral. Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Menurut Kenneth N. Waltz politik luar negeri diartikan sebagai tindakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap lingkungan eksternal. (Kennetz, 1979)

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer. Untuk itu aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional, dan multilateral, KJ Holsti juga mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya (Holsti, 1992).

Terdapat lima landasan dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri kelima landasan itu adalah: (Wittkoff, Kegley, & Scott, 2003)

1. *External Sources* (sumber eksternal) mengacu pada kemampuan suatu negara dan lokasi strategis nya untuk menjaga hubungan dengan negara lain, memperhatikan kondisi lingkungan luar negaranya dan faktor situasional eksternal berupa isu area atau krisis melalui kerja sama, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

2. *Societal Sources* (sumber masyarakat) yaitu, Semua karakteristik sistem sosial dan politik lokal yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah bahwa semua aspek non-negara dari sistem politik mempengaruhi kebijakan luar negeri. Ini termasuk geografi, etnis, nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat, populasi, opini publik
3. *Governmental Sources* (sumber pemerintah) Mencakup semua elemen struktur pemerintahan yang mencerminkan pilihan kebijakan luar negeri dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara luasa merespon situasi *external*
4. *Role Sources* (sumber peran) mengacu pada seperangkat perilaku yang ditentukan secara sosial yang terkait dengan semua individu menduduki posisi resmi dalam suatu sistem politik
5. *Individual Sources* (sumber individu) Dalam hal ini mencakup pihak pemimpin suatu negara yang di pengaruhi oleh prespsi, pengalaman, masa kecil, pengetahuan, latar belakang menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep dalam menjelaskan hubungan antara suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu: (Yani, 2007)

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*) politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi situasi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut, orientasi ini

terdiri dari persepsi, sikap, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah

2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*), kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen kongkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri dengan tujuan untuk menjawab peluang dan tantangan luar negeri
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behavior*), pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris yakni berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternalnya berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat tentu mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan diambilnya. tidak seperti Trump yang jelas-jelas menempatkan Amerika di atas segalanya, Biden berjanji meninggalkan itu dan lebih memperhatikan lingkungan *External* nya terbukti setelah Biden menjadi presiden baru Amerika Serikat Biden menunjukan dalam mengatasi persoalan yang terjadi antara Israel-Palestina lebih mengedepankan kebijakan yang bersifat *External Sources* dimana Joe Biden bersikap untuk membantu suatu negara yang sedang mengalami konflik berupa paket bantuan dana ke Palestina Sebagai bukti keprihatinannya atas nasib rakyat Palestina yang terabaikan di bawah kebijakan Trump.

Kemudian kebijakannya merangkul dan bekerja sama dengan banyak negara di dunia, dalam kerangka ingin menunjukkan bahwa Amerika juga berpengaruh di dunia seperti yang sebelum-sebelumnya. Biden mengedepankan pendekatan secara diplomatik sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang tercermin dari fundamental utama kebijakan luar negeri Biden yaitu multilateralisme.

Menurut Febrian A. Ruddyard sebagai Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Multilarealisme memiliki banyak makna yang diantaranya adalah untuk menciptakan suatu kondisi dimana terdapat keadilan dan sikap saling menghormati antar negara yang berasal dari *trearty* dan hukum internasional yang, Multilarealisme juga merupakan upaya dan semangat untuk menciptakan toleransi. Salah satu contohnya adalah terbentuknya PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Keputusan yang diambil oleh PBB harus memenuhi kepentingan negara anggotanya. Sehingga proses multilateralisme lebih lama dikarenakan harus menaungi kepentingan banyak negara yang berbeda (Yusina, 2018). Multilateralisme sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih berlandaskann pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional (James & Pfaltzgraff, 1997).

Kemudian, kebijakan luar negeri Joe Biden di Timur Tengah dinilai lebih mengedepankan pendekatan multilateral dimana kerjasama Joe Biden dipandang lebih ke arah keamanan dengan tujuan untuk menciptakan kembali wilayah di Timur Tengah sebagai kawasan yang stabil dengan bergabung kembali di perjanjian keringanan

sanksi program nuklir Iran (JCPOA) yang merupakan termasuk perjanjian multilateral.

E. Hipotesis

1. Kebijakan luar negeri AS dimasa pemerintahan Joe Biden lebih berlandaskan kepada *External Sources* dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya yaitu Biden untuk membantu suatu negara yang sedang mengalami konflik dan ancaman dari Negara lain seperti konflik Yaman dan Palestina.
2. Kebijakan luar negeri Amerika di era Biden di percayai lebih mengedepankan pendekatan multilateralisme dengan bergabung kembali di perjanjian multilateral yaitu perjanjian keringan sanksi Iran terhadap program nuklir Iran (JCPOA).

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, metode penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel yang ada untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Yang digunakan penulis adalah deskriptif *explanative* yaitu teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu atau data yang bersifat kualitatif dan analisis dari teori yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas berdasarkan data sekunder yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui berbagai sumber data seperti buku, majalah, jurnal, dokumen report, literature dan bahan-bahan lainnya. Sumber data ini digunakan agar dapat membantu melengkapi penelitian ini

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih mendalam mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di era terpilihnya presiden Joe Biden untuk Timur Tengah. Penelitian ini dibahas dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang pendahuluan mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang kepentingan AS di Timur Tengah.

Bab III Berisi tentang kebijakan politik Amerika Serikat Era Donald Trump.

Bab IV Berisi tentang kebijakan politik Amerika Serikat di Era Presiden Joe Biden untuk Timur Tengah.

Bab V Berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.